



IMPLEMENTASI E-TAX INVOICE: SEBUAH STUDI KOMPARATIF

Dhian Adhетиya Safitra

Politeknik Keuangan Negara STAN

dhian.safitra@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
19 Agustus 2019

Dinyatakan Diterima
23 September 2019

KATA KUNCI:
Taxation

KLASIFIKASI JEL:
H200

ABSTRACT

The fact of the dominance of tax revenue, especially VAT as a source of state revenue, encourages tax authorities in the world to make improvements continuously. One of the milestones in tax administration changes in the world is the development of electronic data-based tax administration. One significant change is the development of an electronic tax invoice mechanism, known as e-tax invoices. South Korea and Chile are the countries that first implemented. For Southeast Asia, there are Thailand and Indonesia which implement it, although with a slightly different scheme. This study compares the implementation of e-tax invoices in the four countries and concludes that the application of e-tax invoices in Indonesia resembles the application of e-tax invoices in South Korea. However, the application of e-Tax Invoice in South Korea has the Automatic Response System (ARS) call service channel or comes to the nearest tax office to issue a Tax Invoice that is not implemented in Indonesia.

ABSTRAK

Fakta atas dominasi penerimaan pajak khususnya PPN sebagai sumber penerimaan negara mendorong otoritas pajak di dunia melakukan perbaikan terus menerus. Salah satu *milestones* perubahan administrasi perpajakan di dunia adalah pengembangan administrasi perpajakan berbasis data elektronik. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah berkembangnya mekanisme penerbitan Faktur Pajak secara elektronik, dikenal dengan *e-tax invoice*. Korea Selatan serta Chili merupakan negara yang terlebih dahulu mengimplementasikan. Untuk Asia Tenggara, ada Thailand dan Indonesia yang mengimplementasikan walaupun dengan skema yang sedikit berbeda. Penelitian ini membandingkan implementasi *e-tax invoice* di empat negara tersebut dan menarik kesimpulan bahwa penerapan *e-tax invoice* di Indonesia menyerupai penerapan *e-Tax Invoice* di Korea Selatan. Namun, penerapan *e-Tax Invoice* di Korea Selatan memiliki kanal The Automatic Response System (ARS) call service atau datang ke kantor pajak terdekat untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak diimplementasikan di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Pentingnya PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang belum berumur tua namun sangat populer. Pentingnya peran PPN dapat dilihat dari kontribusi PPN terhadap penerimaan pemerintah di negara-negara OECD dari 9% menjadi 20% di tahun 1975 hingga 2017 (Keen & Lockwood, 2007; OECD, 2017). Hampir seluruh negara di dunia menggunakan PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang dominan (ITD, 2013) dan menjadi salah satu jenis pajak yang efektif, karena tidak dipengaruhi skala pemerintahan atau siklus politik (Keen & Lockwood, 2006). Sama halnya di Indonesia, di mana hal ini didorong oleh dominasi penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara telah menggeser kontribusi penerimaan negara dari sumber daya alam di era 80-an (Kusumanto, 1989).

Tantangan Administrasi PPN

Keunggulan-keunggulan PPN sebagai salah satu sumber penerimaan negara bukanlah tanpa celah, tiap negara yang mengimplementasikannya memiliki tantangannya tersendiri. Pajak tidak langsung berbasis konsumsi seperti PPN selalu berhadapan dengan masalah administrasi dan kepatuhan (Rosen & Gayer, 2008). Kepatuhan pajak menjadi penting karena hal ini merupakan cerminan rendahnya kontribusi masyarakat sebagai pembayar pajak. Penelitian-penelitian terkait kepatuhan terus berkembang dan menjadi objek penelitian klasik yang terus menjadi perdebatan terkait metode yang tepat meningkatkan kepatuhan (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). Hal ini disebabkan juga karena berkaitan dengan pembiayaan barang dan layanan publik (Witte & Woodbury, 1985).

PPN merupakan pajak yang dikenai di setiap rantai produksi, di mana suatu perusahaan memungut PPN atas penjualan dan memperoleh pengurangan atas PPN yang dibayar saat pembelian bahan baku. Selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli dengan PPN yang dibayarkan ke penyedia bahan baku merupakan hak negara (Sukardji, 2015; Waseem, 2019). Mekanisme perhitungan selisih antara pajak yang dipungut dari pembeli dan yang dibayar ke penyedia bahan baku ini dikenal dengan istilah *the credit-invoice mechanism* yang menjadikan Faktur Pajak sebagai alat administrasi. Konsep dasarnya, mekanisme ini mendorong *self enforcement* antar pelaku usaha yang terdaftar

dalam administrasi PPN (di Indonesia dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak atau PKP) (Waseem, 2019). PPN mendorong pelaku ekonomi selektif memilih lawan transaksinya, sehingga PPN yang dia bayarkan ke penyedia bahan baku atau lawan transaksi bisa menjadi kredit pajaknya. Secara tidak langsung kredit pajak ini merupakan indikasi awal pendapatan penyedia jasa atau lawan transaksi penanggung pajak tadi bagi otoritas pajak (Rosen & Gayer, 2008; Hilman, 2009).

Namun demikian permasalahan utama pada administrasi perpajakan adalah *asymmetry information* antara pembayar pajak dan otoritas perpajakan. Pemerintah melalui otoritas pajaknya, berusaha menutup *gap* informasi yang dimiliki dengan mendorong pelaporan pajak secepatnya baik dilakukan secara mandiri melalui pelaporan atau pihak ketiga (Lederman, 2010).

Kemajuan teknologi informasi mendorong otoritas pajak di dunia untuk beradaptasi untuk melibatkan internet dan teknologi pada sistem administrasinya (Shim & Song, 2016). Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan budaya kepatuhan, otoritas penerimaan negara atau otoritas pajak di berbagai negara berlomba-lomba melibatkan teknologi informasi pada administrasi perpajakannya agar lebih efektif. Beberapa teknologi yang digunakan antara lain *certified cash register*, *online bookkeeping*, *e-filing*, dan *e-invoicing* (Waseem, 2019).

e-Tax Invoice sendiri dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang menjadi salah satu *icon* di revolusi industri yang ketiga di mana kebijakan pengembangan teknologi berdasarkan pada data (Schawb, 2016). Indonesia tidak ketinggalan, setelah sebelumnya mengembangkan e-SPT untuk pelaporan SPT Masa maupun tahunan, sejak 2015, dikembangkan aplikasi e-Faktur Pajak. Aplikasi ini mewajibkan Wajib Pajak mentransmisikan data Faktur Pajaknya terlebih dahulu ke sistem e-Faktur Pajak agar dianggap sebagai Faktur Pajak yang sah.

Implementasi e-Faktur Pajak atau *e-Tax Invoice* ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja. Beberapa negara telah mengimplementasikan dengan konsepnya masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan implementasi *e-Tax Invoice* di beberapa negara dengan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia, serta memberikan masukan terhadap implementasi e-Faktur Pajak yang diterapkan di Indonesia berdasarkan implementasi di negara lain.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi literatur yang menelaah sumber tertulis terkait implementasi *e-Tax Invoice* di dunia baik jurnal maupun laporan. Hasil dari berbagai sumber literatur tersebut digunakan untuk mengidentifikasi implementasi *e-Tax Invoice* di berbagai negara dan membandingkan dengan implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia.

3. IMPLEMENTASI *E-TAX INVOICE* DI BEBERAPA NEGARA

3.1. Uni Eropa

Di Eropa, Uni Eropa berusaha melakukan harmonisasi aturan terkait PPN. Faktur Pajak yang diterbitkan di negara-negara anggota Uni Eropa memiliki konten yang sama dan memperbolehkan Faktur Pajak berbentuk elektronik. Hal ini mulai berlaku sejak tahun 2001. Namun tidak semua negara menerapkan kewajiban penggunaan *e-tax invoice*, sehingga Faktur Pajak kertas dan *e-Tax Invoice* memiliki kedudukan yang sama di daratan Eropa (EU, 2001).

3.2. Korea Selatan

Salah satu negara yang sukses menerapkan *e-Tax Invoice* adalah Korea Selatan. Penerapan *e-Tax Invoice* memberikan keunggulan bagi otoritas pajak Korea (*National Tax Service*) untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan Wajib Pajak di Korea. Di sisi pembayar pajak, *e-Tax Invoice* memberikan kepastian hukum dalam proses pengkreditan PPN yang secara tidak langsung meningkatkan kepatuhan (Lee, 2016). *E-Tax Invoice* di Korea muncul pertama kali pada tahun 2001. Kala itu, implementasinya masih bersifat suka rela. Namun sejak 2011 di Korea penerbitan *e-Tax Invoice* diwajibkan kepada seluruh perusahaan yang terdaftar dalam administrasi PPN (PWC, 2012; Awasthi, et al., 2019) dan pada tahun 2012 orang pribadi dengan omzet di atas KRW 1 miliar atau sekitar Rp 12 miliar diwajibkan menggunakan *e-tax invoice* (Shim & Song, 2016) dan di bulan Juli 2014, orang pribadi dengan omzet KRW 300 Juta atau sekitar Rp 3.6 miliar diwajibkan mengimplementasikan *e-Tax Invoice* (Awasthi, et al., 2019).

Kanal penerbitan *e-Tax Invoice* di Korea dibedakan atas kemampuan Teknologi Informasi pembayar pajak. Untuk perusahaan besar yang telah menerapkan ERP system pada perusahaannya atau menggunakan ASP (*Application System Provider*) dapat menggunakan sistem yang mereka punya untuk

menerbitkan *e-tax invoice* dengan menyeragamkan konten yang ada di dalam Faktur Pajak yang diterbitkan. Untuk pembayar pajak skala kecil atau yang tidak memiliki kemampuan pengadaan Teknologi Informasi yang memadai dapat menggunakan aplikasi berbasis web secara gratis dengan mengakses www.esero.go.kr. Layanan *e-tax invoice* yang berbasis web ini dapat diakses selama 24 jam difasilitasi layanan konsultasi (Awasthi, et al., 2019). Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki akses internet, dapat menggunakan The *Automatic Response System* (ARS) *call service* atau datang ke kantor pajak terdekat untuk menerbitkan Faktur Pajak. *National Tax Service* (NTS) atau otoritas pajak di Korea memberikan beberapa kanal penerbitan Faktur Pajak untuk memberikan kemudahan bagi pembayar pajak untuk patuh terhadap kewajiban menerbitkan Faktur Pajak secara elektronik (Shim & Song, 2016).

Penerbitan pada seluruh kanal mewajibkan pembayar pajak untuk mengirimkan Faktur Pajak yang diterbitkan secara *online* ke NTS. Bagi pengguna esero, data terkirim otomatis ke NTS sesaat setelah Faktur Pajak diterbitkan. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan ERP/ASP, mereka harus mentransmisi data mereka ke NTS paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dilakukan karena pada umumnya penerbitan Faktur Pajak masal pada periode tertentu. Dengan adanya kewajiban penerbitan Faktur Pajak secara elektronik, NTS dapat dengan mudah mengetahui detail transaksi yang terjadi di lapangan sesaat setelah penerbitan Faktur Pajak dengan ekspektasi penurunan tingkat penggelapan PPN dan biaya kepatuhan pembayar pajak. Korea membutuhkan waktu 3 tahun untuk menerapkan kewajiban penerbitan Faktur Pajak secara elektronik, dan proses transisi ini menjadi salah satu faktor kesuksesan Korea menerapkan *e-Tax Invoice* (Shim & Song, 2016). Format Faktur Pajak yang dihasilkan kanal ERP, ASP, dan esero berupa data berformat *Extensible Markup Language*¹ (XML) (Barreix, et al., 2018)

Tantangan dari administrasi PPN di Korea adalah pengkreditan pajak atas transaksi fiktif atau pedagang fiktif. Proses validasi faktur sebelum diimplementasikan *e-tax invoice* menjadi tantangan terbesar, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan terkirimnya secara *real time* transaksi yang dilakukan pembayar pajak maka NTS dapat dengan cepat melakukan validasi faktur dengan penyandingan secara otomatis dan *real time* (Krever, 2014).

¹ Format dokumen elektronik yang dapat dibaca oleh manusia atau mesin

3.3. Chili

E-Tax Invoice di Chili pertama kali dicetuskan pada tahun 2000 yang diinisiasi otoritas pajak Chili, *Servicio de Impuestos Internos* (SII). Pada tahun 2002, 8 perusahaan ditunjuk dalam rangka piloting implementasi *e-Tax Invoice* dan pada 24 April 2003, *e-tax invoice* yang diterbitkan oleh 8 perusahaan ini telah secara legal dianggap sebagai Faktur Pajak yang sah. Pada 2 September 2003, *e-Tax Invoice* dibuka untuk perusahaan lain yang ingin mengimplementasikan *e-Tax Invoice* (Barros & Madelain, 2004). Pada tahun 2014 seluruh perusahaan besar di Chili telah mengadopsi *e-Tax Invoice* dalam proses penerbitan Faktur Pajaknya (Barreix, et al., 2018).

Berbeda dengan implementasi di Korea, SII hanya memberikan spesifikasi dari komponen aplikasi yang akan digunakan pembayar pajak. Regulasi di Chili mengharuskan transaksi yang terjadi di Chili didukung dengan sebuah dokumen yang sebelumnya diotorisasi SII. Jenis dokumen tergantung dari transaksi, seperti *invoice* untuk transaksi jual beli atau form khusus untuk transportasi. Pada setiap dokumen, terdapat id unik yang diberi SII sebagai pertanda dokumen tersebut diotorisasi SII. Otorisasi ini diperoleh melalui *website*.

Setiap dokumen dari transaksi yang terjadi harus dikirim ke SII sebelum diserahkan ke pembeli. Dokumen harus memiliki *digital seal* yang *digenerate* sistem milik pembayar pajak serta *authorization stamp* yang diperoleh dari SII. SII memberikan kemudahan bagi pembeli untuk melakukan pengecekan atas Faktur yang diberikan pembeli, apakah sudah terotorisasi atau belum, saat pembeli menerima konfirmasi dari *web site* SII, maka dia akan menerima Faktur dari penjual yang dapat digunakan sebagai kredit pajak. *Electronic invoice* dianggap sah jika memenuhi kriteria yang diberikan oleh SII. Jika pembeli tidak mendapati faktur terverifikasi oleh *website* SII, pembeli dapat menolak Faktur yang diberikan penjual (Barros & Madelain, 2004; Barreix, et al., 2018). Untuk pengusaha berskala kecil, pada tahun 2005 SII meluncurkan *e-invoice portal* yang memungkinkan 200 ribu pengusaha kecil dapat menerbitkan dan menerima *e-tax invoice* dari lawan transaksinya (Lee, 2016).

Beberapa kriteria yang diprasyaratkan oleh SII dalam penerbitan Faktur Pajak antara lain:

1. Pembayar pajak dilarang menerbitkan Faktur jika tidak mendapatkan *stamp* dari SII;
2. SII memberikan otorisasi atas Faktur yang diajukan oleh pembayar pajak;

3. Setiap faktur yang ditolak oleh pembeli mengharuskan penjual membatalkan faktur yang telah diterbitkan;
4. *Id invoice* hanya bisa digunakan untuk satu jenis faktur;
5. Tidak dapat membatalkan faktur yang tidak pernah diterbitkan;
6. Proses penerbitan faktur dianggap selesai jika telah diterima oleh pembeli atau dibatalkan oleh SII.

Bentuk dari *e-Tax Invoice* adalah dokumen elektronik berformat XML yang memerlukan *digital certificate* dari pembayar pajaknya. *Digital Certificate* disediakan oleh otoritas pajak di Chili (ISS) atau dapat disediakan oleh pihak ketiga. Selain itu, *digital certificate* ini melekat pada perusahaan atau perorangan. Validasi yang dilakukan secara *real time*. Pendistribusian *e-tax invoice* sebagai dokumen dapat dilakukan dengan surat elektronik, tanpa harus mencetak. Sistem ini juga menjaga terjadinya *invoice* ganda yang dapat disalahgunakan sebagai kredit pajak (Barreix, et al., 2018).

3.4. Thailand

Pemerintah Thailand sedang berupaya untuk mendorong pelaku bisnis di Thailand, baik individu maupun perusahaan untuk beralih dari transaksi tunai ke transaksi elektronik. Hal ini dipercaya oleh mereka akan meningkatkan efisiensi (PwC, 2017). *Revenue Departement of Thailand (RD)* atau otoritas penerimaan di Thailand memiliki beberapa layanan elektronik yang salah satunya adalah *e-Tax Invoice* (Suwisuthikasem & Tangsripairoj, 2008) yang merupakan salah satu proyek yang didorong untuk berkembang berkenaan dengan upaya mengelektronikkan transaksi di Thailand. Konsep *e-Tax Invoice* dikenalkan pada tahun 2012 di mana pada tahun tersebut implementasi hanya diperuntukkan untuk perusahaan terbuka, namun sejak tahun 2017 aturan tersebut diperluas ke seluruh pelaku bisnis di Thailand.

Kanal yang disediakan beragam, disesuaikan dengan besarnya perusahaan, kapasitas dan kesiapan teknologi merupakan faktor dibukanya beberapa kanal. Ada 2 kategori sistem elektronik yang ditawarkan. Pertama yaitu *e-Tax Invoice/e-Receipts* berbentuk dokumen berbentuk XML (*Extensible Markup Language*) dengan sertifikat digital. Metode ini membutuhkan penyesuaian pada sistem yang dimiliki WP sesuai dengan aturan dan pengaturan sistem yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku. Sertifikat Digital diterbitkan oleh *service provider* tunggal yang ditunjuk RD. Kedua adalah *e-Tax Invoice* yang berbentuk email yang didesain untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari THB 30

juta atau sekitar Rp. 13,7 Miliar per tahun dari tahun 2015. Dengan metode ini, Wajib Pajak akan mengirim dokumen elektronik berformat PDF, Word, atau Excel ke portal yang disediakan RD. Sistem akan memberikan stempel waktu dan tanggal sebagai bukti pengesahan. Implementasinya bersifat wajib yang berdampak meningkatnya biaya kepatuhan untuk Wajib Pajak berskala kecil atau yang memiliki keterbatasan sumber daya ("Thailand 4.0 – Implementation of e-Tax Invoice and e-Receipt," 2018).

3.5. Indonesia

Nomor Seri Faktur Pajak

Untuk menerbitkan Faktur Pajak, Wajib Pajak yang terdaftar di administrasi PPN atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditentukan oleh otoritas pajak di Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Prosedur ini berlaku sejak 1 April 2013. Nomor Seri Faktur Pajak ini diperoleh dengan terlebih dahulu melakukan permintaan Kode Aktivasi dan *password* elektronik Nomor Faktur (*e-NOFA*) sebagaimana diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014.

Sebelum 1 April 2013, penomoran Faktur Pajak dilakukan mandiri oleh PKP dengan mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010. Kode Aktivasi dan *password e-NOFA* ini pada tahun 2014 digunakan sebagai alat otentifikasi pemberian sertifikat digital yang berfungsi sebagai tandatangan elektronik pengganti tandatangan basah pada Faktur Pajak Kertas.

Kanal Penerbitan e-Tax Invoice

Di Indonesia, terdapat beberapa kanal penerbitan *e-Tax Invoice* (DJP, 2014). Pertama, melalui *client desktop*. Kanal ini merupakan kanal yang pertama kali dikenalkan dimana PKP menerbitkan e-Faktur Pajak dengan aplikasi berbasis desktop. Aplikasi ini dapat dioperasikan secara *offline*, dan hanya memerlukan

sambungan internet saat mengesahkan Faktur Pajak.

Kedua, aplikasi e-Faktur *Web Based*. Aplikasi ini berbasis *web* yang harus dioperasikan dengan sambungan internet. Kanal ini diperuntukkan untuk PKP yang tidak terlalu banyak menerbitkan Faktur Pajak seperti PKP dengan skala usaha UMKM. Kelemahan dari kanal ini adalah Wajib Pajak harus terkoneksi dengan internet, walaupun tidak perlu memiliki perangkat khusus.

Ketiga, Aplikasi e-Faktur Pajak *Host to Host* (H2H). Kanal diperuntukkan untuk perusahaan dengan kapasitas penerbitan Faktur Pajak Besar dan memiliki dukungan sumber daya Teknologi Informasi yang mapan. Untuk kanal H2H, PKP dapat melakukannya secara mandiri atau melalui Penyelenggara e-Faktur Pajak H2H atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang diperkenankan untuk memberikan layanan ini hanyalah Penyedia yang telah ditetapkan oleh DJP setelah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Keadaan Tertentu

Implementasi *e-Tax Invoice* di Indonesia sangat bergantung dengan sambungan internet, saat PKP tidak dapat mengakses internet, dia tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak. Untuk memitigasi masalah ini, terdapat klausul pada pasal 9 PER-16/PJ/2014 yang memungkinkan PKP menerbitkan Faktur Pajak berbentuk kertas. Keadaan khusus ini merupakan keadaan di luar kekuasaan PKP seperti terjadi peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya. Namun keadaan tertentu ini harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Pajak. Setelah Direktur Jenderal Pajak menetapkan bahwa keadaan tersebut berakhir, maka Wajib Pajak harus kembali menerbitkan Faktur Pajak dalam bentuk elektronik, dan Faktur Pajak Kertas yang sudah diterbitkan diunggah ke sistem DJP melalui aplikasi atau

3.6. Tantangan Implementasi e-Faktur di Indonesia

Ada beberapa tantangan yang teridentifikasi dapat menjadi tantangan implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia sehingga menjadi hambatan bagi otoritas pajak untuk mencapai *outcome* yang diharapkan. Pertama, saat ini, penetrasi pengguna internet di Indonesia belum optimal, tercatat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 54,68% atau sebesar 143,26 juta penduduk dari 262 juta penduduk (APJI, 2018). Walaupun belum optimal, angka ini

merupakan ke empat tertinggi di bawah India, China, dan Amerika Serikat (We Are Social, 2019). Namun, penetrasi tersebut tidak diimbangi dengan penetrasi penggunaan *gadget*. Penetrasi penggunaan *gadget* penduduk di Indonesia relatif kecil, tercatat penduduk yang memiliki Laptop atau komputer sebesar 25,72% dan kepemilikan telepon pintar atau komputer tablet sebesar 50.08% (APJI, 2018).

Kedua, dari pengguna internet yang ada, aplikasi yang dibuka oleh masyarakat Indonesia mayoritas aplikasi hiburan atau sosial media seperti aplikasi *chatting* sekitar 89.35% dan untuk akses ekonomi seperti transaksi penjualan barang hanya 8.12% (APJI, 2018). Aplikasi e-Faktur merupakan aplikasi yang cukup spesifik, di mana pengguna harus memiliki pengetahuan dasar mengenai tata cara penerbitan e-Faktur sehingga pengoperasiannya tidak sesederhana aplikasi *chatting*.

Ketiga, dari pengguna internet tersebut, tingkat pengguna internet yang mengakses situs atau aplikasi layanan publik tidak lebih dari 16% (informasi UU, informasi administrasi, pendaftaran SIM/KTP/Paspor, Lapor Pajak, dan Lapor pengaduan yang berbalikan dengan tingkat pemanfaatan di bidang hiburan yang tidak kurang dari 54.13% seperti sosial media, unduh musik/film, berita *online*, *game* (APJI, 2018).

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Komparasi Implementasi eTax Invoice di Indonesia dengan Negara Lain

Sejak 2016, secara mandatori seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada administrasi PPN Indonesia atau Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menerbitkan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur secara umum menyerupai konsep yang diterapkan di Chili dan Korea Selatan. Berikut beberapa kesamaan konsep implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia dengan implementasi di beberapa negara lainnya:

Nomor Seri Faktur Pajak

Untuk menerbitkan Faktur Pajak, Wajib Pajak harus melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan syarat telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN 3 masa terakhir dan memiliki Sertifikat Elektronik sebagai pengganti tanda tangan basah/manual. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan atau kepatuhan formal. Prosedur ini menyerupai konsep *id invoice* di Chili, di mana pembayar pajak

di Chili hanya dapat menerbitkan Faktur sejumlah *id invoice* yang diberikan otoritas pajak Chili (SII).

Pada tahun 2015, dibuka kanal baru permintaan NSFP secara *online* melalui aplikasi e-NOFA (e-Nomor Faktur). Wajib Pajak dapat meminta NSFP kapan pun di mana pun melalui jaringan internet selama telah melaporkan SPT Masa PPN. Untuk alasan keamanan, setiap 2 tahun sekali, Wajib Pajak harus membaharui Sertifikat Elektronik yang diperoleh yang harus diajukan oleh Wajib Pajak sendiri atau pengurus perusahaan yang namanya tercatat sebagai pengurus pada Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya dan SPT Tahunan PPh (DJP, 2015).

Penerapan NSFP berlaku sejak 2012 di mana Faktur Pajak masih diterbitkan dengan bentuk kertas. Prosedur ini tetap diberlakukan hingga kini saat seluruh Pengusaha Kena Pajak telah diwajibkan menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur Pajak pada Juli 2016. Sebelum e-Faktur Pajak diterapkan secara nasional, Aplikasi e-NOFA juga dapat digunakan pembeli untuk memvalidasi Faktur Pajak yang diperoleh dari Pembeli dengan melakukan pengecekan jatah NSFP. Konsep pengecekan ini menyerupai konsep validasi yang diterapkan di Chili. Namun konsep *id invoice* di Chili hanya diperuntukkan untuk pengusaha yang menggunakan dokumen lain yang kedudukannya sama dengan Faktur Pajak seperti form khusus untuk transformasi.

Di Indonesia, dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak memiliki *id invoice*. Dokumen-dokumen ini dapat menjadi kredit pajak tanpa melalui mekanisme validasi. Validasi dilakukan oleh DJP dengan melakukan penandingan data setelah WP melaporkan SPT Masa PPN. Sehingga risiko pengkreditan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang tidak sah secara formal masih mungkin terjadi, sama seperti saat Faktur Pajak masih berbentuk kertas.

Memperhatikan praktik yang dilakukan di negara lain, maka ada beberapa opsi yang dapat dilakukan terkait penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak di Indonesia, pertama, meniadakan Nomor Seri Faktur Pajak untuk transaksi yang harus menggunakan e-Faktur Pajak. Mengingat, tujuan awal diberlakukan konsep Nomor Seri Faktur Pajak adalah menjembatani masa transisi di mana, terdapat Wajib Pajak yang masih menggunakan Faktur Pajak kertas dan ada yang sudah diwajibkan menggunakan e-Faktur Pajak di awal implementasi. Kedua, masih dimungkinkannya penerbitan Faktur Pajak kertas saat terjadi skenario keadaan tertentu atau masih

adanya dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, menyebabkan masih terdapatnya validasi kredit pajak yang tidak *real time*. Untuk menjembatani hal ini, konsep *id invoice* di Chili dapat menjadi alternatif opsi, sehingga terdapat mekanisme pengendalian pengkreditan pajak masukan atas dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Bagaimana dengan e-Faktur Pajak? Di Indonesia, dokumen yang telah dilaporkan ke Sisten e-Faktur Pajak akan diberi *date/time stamp* yang berbentuk *approval code*. Secara fisik, *approval code* berbentuk *QR code* pada keluaran aplikasi e-Faktur Pajak. *QR Code* ini merupakan kode unik yang dimiliki setiap e-Faktur Pajak. Mengingat Nomor Seri Faktur Pajak tidak dapat digunakan pada lebih dari satu e-Faktur Pajak, maka terdapat dua kode unik di e-Faktur Pajak, yaitu, *approval code* dan Nomor Seri Faktur Pajak. Jika *approval code* dapat dianggap Nomor Seri Faktur Pajak, terdapat efisiensi prosedur yang dapat mengurangi *compliance cost* Wajib Pajak maupun beban administrasi DJP dalam memproses pemberian maupun pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak.

Format Data e-Tax Invoice

Secara umum, Faktur Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi Faktur Pajak berbentuk Elektronik dan Faktur Pajak berbentuk lainnya. Faktur Pajak kertas memungkinkan diterbitkan oleh PKP dengan beberapa keadaan di mana Direktur Jenderal Pajak menetapkan keadaan tertentu. Selain itu, terdapat beberapa Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai [1] pedagang eceran, [2] Toko Retail terdaftar yang bertransaksi dengan orang pribadi asing pemegang paspor luar negeri, atau [3] wajib pajak yang menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dikecualikan menerbitkan e-Faktur Pajak.

E-Faktur Pajak sendiri merupakan dokumen elektronik berformat .pdf yang telah diberi *approval code* oleh DJP berbentuk *QR code*. Konsep dokumen berbentuk .pdf ini serupa yang diimplementasikan di Thailand namun berbeda prosedur. Jika di Indonesia dokumen elektronik berbentuk .pdf dihasilkan sebagai *output* aplikasi e-Faktur Pajak (semua jalan), sedangkan di Thailand, dokumen elektronik berbentuk .pdf merupakan dokumen yang dihasilkan oleh Wajib Pajak yang kemudian dimintakan *time and date stamp* yang diberikan otoritas pajak di Thailand dengan cara mengirimkan dokumen elektronik tersebut.

Penggunaan dokumen elektronik berbentuk .pdf ini mengakomodasi beberapa proses bisnis

baik proses bisnis Wajib Pajak atau proses bisnis terkait regulasi yang menyaratkan dokumen dicetak. Sebagai contoh dalam proses pembelian barang oleh pemungut pajak, salah satu dokumen yang harus dilampirkan adalah e-Faktur Pajak.

Memperhatikan praktik di negara lain, format berbentuk XML lebih dominan digunakan seperti yang diimplementasikan di Korea Selatan, Chili, maupun Thailand, namun perlu penelitian lebih dalam, apakah penerapan format ini di Indonesia memberikan *outcome* lebih besar dibandingkan masa transisi perubahan format.

Kanal Penerbitan Faktur Pajak

Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur Pajak) adalah Faktur Pajak yang diterbitkan melalui sistem elektronik atau aplikasi yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2014). Dalam implementasinya, penerapan di Indonesia tidak berbeda jauh dengan penerapan di Korea Selatan, di mana otoritas pajak di Indonesia menyediakan beberapa kanal penerbitan e-Faktur Pajak, antara lain [1] Aplikasi e-Faktur Pajak *Client Desktop*, [2] Aplikasi e-Faktur Pajak *Web Based*, dan [3] Aplikasi e-Faktur Pajak *Host to Host* (H2H). Untuk aplikasi e-Faktur Pajak H2H Wajib Pajak dapat memilih mengadakan sendiri aplikasinya atau menggunakan jasa penyelenggara e-Faktur Pajak. Perbedaan kanal antara Indonesia dan Korea Selatan antara lain di Indonesia menyediakan aplikasi *client desktop* sedangkan Korea Selatan menyediakan *The Automatic Response System* (ARS) *call service* atau datang ke kantor pajak terdekat untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia sangat bergantung sekali dengan sambungan internet. Walaupun e-Faktur berbasis *desktop application* dapat dioperasikan tanpa sambungan internet, namun data yang ada pada aplikasi dapat dianggap Faktur Pajak saat data tersebut dilaporkan ke sistem e-Faktur Pajak dan mendapatkan *approval code*. Bagaimana untuk daerah-daerah atau Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan sumber daya? Korea Selatan yang memiliki infrastruktur lebih mapan dibanding Indonesia masih membuka kanal *Automatic Response System* (ARS) *call service* atau datang ke kantor pajak terdekat. Hal ini dapat menjadi opsi implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia. Kanal ini dapat diarahkan untuk PKP baru atau PKP yang memiliki keterbatasan sumber daya yang masih membutuhkan bimbingan atau bantuan sumber daya terutama koneksi internet.

Berikut perbandingan implementasi *e-tax invoice* di beberapa negara:

Tabel 1. Komparasi Implementasi *e-Tax Invoice* di beberapa negara

No	Perbandingan	Uni Eropa	Chili	Korea Selatan	Thailand	Indonesia
1.	Nomor Faktur	-	<i>Ide invoice</i> hanya bisa digunakan pada satu Faktur Pajak	-	-	Diwajibkan melakukan permintaan ke DJP dalam bentuk Nomor Seri Faktur Pajak. Dapat diminta secara langsung ke KPP atau secara <i>online</i> melalui laman efaktur.pajak.go.id
2.	Implementasi	Mulai berlaku sejak 2001 (tidak semua negara mengimplemen- tasikan	2003: 8 perusahaan yang ditunjuk 2014: seluruh perusahaan besar mengimplemen- tasikan <i>E-Tax Invoice</i> 2018: seluruh perusahaan mengimplemen- tasikan <i>e-Tax Invoice</i>	2001: bersifat suka rela 2011: diwajibkan ke seluruh pembayar pajak berbentuk badan yang terdaftar dalam administrasi PPN 2012: orang pribadi dengan omzet lebih dari KRW 1 miliar diwajibkan 2014: orang pribadi dengan omzet di atas KRW 300 juta diwajibkan	2012: hanya untuk perusahaan terbuka 2017: seluruh pelaku bisnis di Thailand	Secara bertahap: 2014: PKP yang ditunjuk 2015: Seluruh PKP di Pulau Jawa dan Bali 2016: Seluruh PKP terdaftar
3.	Bentuk Faktur Pajak	<i>E-tax invoice</i> dan Faktur Pajak kertas (memiliki kedudukan yang sama)	<ul style="list-style-type: none"> Elektronik berformat XML; Dokumen tradisional (form fisik) yang diberikan <i>id invoice</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronik berformat XML; Untuk perusahaan retail menggunakan <i>cahs register</i> 	Berbentuk dokumen XML dengan Sertifikat digital dan file .pdf/word/excel yang diberi stempel waktu dan tanggal bukti pengesahan	e-Faktur Pajak (Elektronik dalam format .pdf) dan Faktur Pajak Kertas (Saat terjadi keadaan tertentu)
4.	Pengesahan	-	<i>Real time validation</i> dalam bentuk <i>authorization stamp</i>	Membutuhkan <i>authenticated digital certificate</i> untuk layanan berbasis web, ASP, dan ERP	<i>Time and date stamp</i> yang diberikan saat diupload ke sistem RD	<i>Approval Code</i> yang diperoleh saat faktur dilaporkan ke sistem e-Faktur Pajak
5.	Kanal	-	<ul style="list-style-type: none"> H2H dengan menyeragamkan komponen aplikasi yang digunakan <i>E-tax invoice</i> portal 	<ul style="list-style-type: none"> ERP/ASP; <i>Website</i> melalui www.esero.go.kr <i>ARS Call Service</i> Datang ke <i>local tax office</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem berbasis XML Email dalam bentuk .pdf, .xls, atau .doc 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Desktop Application</i>; <i>Web Base</i>; <i>Host to host</i> (dilaksanakan sendiri atau menggunakan bantuan jasa penyelenggara aplikasi);
6.	Target Pengguna	-	<ul style="list-style-type: none"> H2H untuk perusahaan yang memiliki divisi IT <i>E-tax invoice</i> portal untuk perusahaan yang masuk kategori UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> ERP/ASP: perusahaan besar dengan yang memiliki divisi IT <i>Website</i>: untuk perusahaan berskala kecil <i>ARS Call Service</i>: untuk 	Kanal email diperuntukkan untuk pelaku bisnis yang masuk kategori kecil atau beromset THB 30 juta atau sekitar Rp 13,7 miliar per tahun sejak	<ul style="list-style-type: none"> <i>Desktop Application</i> : seluruh PKP <i>Web Base</i>: untuk WP kecil atau tidak banyak menerbitkan Faktur Pajak; H2H: PKP

				perusahaan atau perorangan yang tidak memiliki akses internet	tahun 2015.	dengan kemampuan teknologi informasi mapan
7.	Penyedia Layanan/Pihak ke-3 yang terlibat	-	Penyedia Layanan Aplikasi mengembangkan aplikasi untuk perusahaan dengan memperhatikan komponen aplikasi yang dipersyaratkan yang dipersyaratkan SII	Otoritas Pajak Korea menentukan format data yang harus d disesuaikan oleh ASP/penyedia layanan aplikasi	-	Khusus untuk kanal H2H

Sumber: Dari berbagai sumber

4.2. Mitigasi atas Tantangan Implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia

Memperhatikan prosedur penerbitan Faktur Pajak di Indonesia sangat bergantung dengan internet dan tidak ada prosedur alternatif bagi yang tidak memiliki akses atau sumber daya, maka perlu upaya lebih untuk meningkatkan penetrasi internet dan/atau memfasilitasi Wajib Pajak dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini dibutuhkan agar transaksi yang memerlukan akses ke Aplikasi e-Faktur Pajak tidak terhambat sehingga secara kumulatif tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia, mengingat penerbitan e-Faktur Pajak selalu bergandengan dengan transaksi ekonomi. Konsep ARS di Korea Selatan dapat menjadi salah satu alternatif dengan memperluas fungsi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan atau penyediaan sumber daya (komputer dan sambungan internet) di daerah-daerah *remote*, *Help Desk* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Namun alternatif ini perlu diukur kembali *cost and benefit* dari penyediaannya yang tidak dibahas pada penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil studi literatur, diketahui bahwa implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia memiliki kesamaan dengan implementasi e-Tax Invoice di Korea, Chili, maupun Thailand. Kesamaan ditemui baik dari sisi bentuk maupun kanal penerbitan. Namun, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar penerapan e-Faktur Pajak di Indonesia, antara lain: [1] penggunaan *id invoice* untuk dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana diterapkan di Chili, [2] format dokumen elektronik berbentuk XML seperti yang diterapkan di Korea Selatan, Chili, maupun Thailand, serta [3] adanya kanal *Automatic*

Response System (ARS) call service atau datang ke kantor pajak terdekat seperti di Korea Selatan.

Konsep e-Faktur Pajak di Indonesia sangat bergantung dengan koneksi internet. Dari ketergantungan tersebut terdapat tantangan bahwa penetrasi internet di Indonesia belum optimal. Selain itu, dari data APJI (2018) diketahui bahwa, dominasi penggunaan internet yang belum optimal masih didominasi penggunaan internet untuk keperluan hiburan bukan untuk mengakses portal *online* layanan publik.

5.2. Saran

Dari hasil komparasi implementasi *e-Tax Invoice* di beberapa negara dan hasil identifikasi tantangan implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia, ada beberapa saran yang dapat menjadi opsi kebijakan implementasi e-Faktur Pajak, antara lain:

1. Penyesuaian prosedur dan regulasi terkait Nomor Seri Faktur Pajak, di mana Nomor Seri Faktur Pajak diberikan sebagai media validasi untuk dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. Sedangkan untuk e-Faktur Pajak, *approval code* dapat dianggap sebagai kode unik yang dipersamakan dengan Nomor Seri Faktur Pajak;
2. Penyediaan kanal *Automatic Response System (ARS) call service* atau datang ke kantor pajak terdekat seperti di Korea Selatan untuk mengakomodir Wajib Pajak baru dan/atau yang tidak memiliki sumber daya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini adalah terbukanya opsi baru dalam implementasi e-Faktur Pajak di Indonesia untuk mengakomodir efisiensi prosedur atau peningkatan pelayanan ke Wajib Pajak baru atau yang tidak memiliki sumber daya. Untuk mengakomodir opsi tersebut, perlunya perubahan prosedur dan regulasi, khususnya regulasi tentang

e-Faktur Pajak sebagaimana tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik s.t.d.t.d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum mengidentifikasi tantangan dan hambatan implementasi e-Faktur Pajak dari *stakeholder* e-Faktur Pajak seperti Wajib Pajak sebagai pengguna, Kantor Pusat DJP sebagai penyusun regulasi dan prosedur, KPP sebagai unit pembina Wajib Pajak, Konsultan Pajak, maupun Penyedia Jasa Layanan Perpajakan yang dapat memperkaya hasil dari identifikasi hambatan dan tantangan implementasi e-Faktur di Indonesia.

REFERENSI

- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economics Literature*, 36(2), 818-860.
- APJI. (2018). *Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia.
- Awasthi, R., Lee, H. C., Poulin, P., Choi, J. G., Kim, W. C., Lee, O. J., . . . Chang, S. Y. (2019). *The Benefits of Electronic Tax Administration in Developing Economies: A Korean Case Study and Discussion of Key Challenges*. World Bank.
- Barreix, A. D., Zambrano, R., Costa, M. P., da Silva Bahia, Á. A., Almeida de Jesus, E., Pimentel de Freitas, V., . . . Rasteletti, A. (2018). *Electronic Invoicing in Latin America*.
- Barros, T., & Madelain, E. (2004). *Electronic Invoice as Formalisation and Verification of the Chilean Tax system*. Institute de Recherche en Informatique et en Automatique.
- DJP. (2012). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- DJP. (2014). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik s.t.d.t.d PER-31/PJ/2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- DJP. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- DJP. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- EU. (2001). *Directive 2001/115/EC Section 5 Article 232*. European Union (EU).
- Hilman, A. L. (2009). *Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Governments* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- ITD. (2013). *Key Issues and debates in VAT, SME taxation and the tax treatment of the financial sector*. (A. Carter, Penyunt.) International Tax Dialogue.
- Keen, M., & Lockwood, B. (2006, December). Is the VAT a Money Machine? *National Tax Journal*, LIX(4), 905-928.
- Keen, M., & Lockwood, B. (2007). *IMF Working Papes: The Value Added Tax-its causes and consequences*. Fiscal Affair Departement: IMF.
- Krever, R. (2014). Combating VAT Fraud: Lessons from Korea? *BTR*, 303-314.
- Kusumanto, B. (1989). *Dissertation: Incidence of value added tax in Indonesia: a general equilibrium analysis*. Illinois: University of Illinois.
- Lederman, L. (2010). *Reducing Information Gaps to Reduce the Tax Gap: When is Information Reporting Warranted?* Fordham Law Review.
- Lee, H. C. (2016). *Can Electronic Tax Invoicing Improve Tax Compliance? A Case Study of the Republic of Korea's Electronic Tax Invoicing for Value-Added Tax*. Equitable Growth, Finance and Institutions Global Practice Group. Diambil kembali dari <http://econ.worldbank.org>
- OECD. (2017). *Revenue Statistics, Organization for Economic Cooperation and Development*. Diambil kembali dari <https://goo.gl/WC1M1L>.
- PWC. (2012). *A Summary of Korean Corporate and Individual Income taxes 2013*. PKF (UK) LLP.
- PwC. (2017). *E- Tax Invoice and E- Reciept*. PwC.
- Rodl & Partner. (2018, April 24). *Thailand 4.0 – Implementation of e-Tax Invoice and e-Receipt*. Dipetik Agustus 1, 2019, dari www.roedl.com: <https://www.roedl.com/insights/thailand->

- 4-0-digital-economy-implementation-e-tax-invoice-e-receipt
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). *Public Finance* (8th ed.). Tata McGraw-Hill.
- Schawb, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Shim, T. S., & Song, I. K. (2016). Critical Success Factors of the Web-based Tax Invoice System in Korea. *KSII Transaction on Internet and Information System*, 10(9), 4487-4508.
- Sukardji, U. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*. Depok: Rajawali Pers.
- Suwisuthikasem, S., & Tangsripairoj, S. (2008). E-Tax Invoice System Using Web Services Technology: A Case Study of The Revenue Department of Thailand . *Ninth ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking, and Parallel/Distributed Computing* (hal. 937-943). IEEE.
- Waseem, M. (2019). Information, Asymmetric Incentives, Or Withholding? Understanding the Self-Enforcement of Value-Added Tax. doi:<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3355865>
- We Are Social. (2019). *Global Digital Report 2019*. Dipetik Agustus 14, 2019, dari <https://wearesocial.com>: <https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>
- Witte, A. D., & Woodbury, D. F. (1985). Tax Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance The Case of The U.S. Individual Income. *National Tax Journal*, 1-11.